

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH NTB
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ROI/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	URAIAN	RINCIAN PERITUNGAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	TARGET 2023 (KRO/ROI)	PAGU 2021			PAGU 2022			PENJELASAN KENAIKAN ATAU PENURUNAN ANGGARAN	KETERANGAN
								ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KRO/ROI)	ANGGARAN (SUBKOMPONEN)		TARGET (KRO/ROI)		
								DIPA	REALISASI	AWAL	REALISASI				
013.WA	Program Dukungan Manajemen														
5248	Penyenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah														
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-Pemerataan rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia -Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang dilaksanakan di wilayah.				218.640.000	3.Rekomendasi Kebijakan	219.640.000	215.554.850	1.8 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi	219.640.000	3.Rekomendasi Kebijakan	Volume : 3 Rekomendasi Kebijakan	
5248.ABD.001	Pengkajian Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah														Output : Berlanjut
051	Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-Pelaksanaan kajian hukum dan hak asasi manusia di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi Balitbang Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah.				205.469.000	2.Rekomendasi Kebijakan	212.645.000	208.565.850			205.469.000	2 Rekomendasi	Komponen: Utama	
A1	Kajian Hukum / Kajian HAM / Kajian Kebijakan							83446000	83823425			68.170.000			
521211	Belanja Bahan	- ATK dan Komputer supplies	1 PKT x Rp.584.000	1	PKT	584.000	Rp.584.000,00	10920000	10912500			5.264.000			Max. Rp.1.500.000,-
		- Kertas	3 Rm x 1	3	Rm	50.000	150.000								
		- Ballpoint	3 Lusin x 1	3	Lusin	25.000	75.000								
		- Tinta Roll	3 buah x 1	3	buah	100.000	300.000								
		- Amplip	3 buah x 1	3	buah	22.000	66.000								
		- Konsumsi rapat (makan)	15 ORG x 1 KAL x Rp.3.225.000	15	ORG	43.000	3.225.000								SBM
		- Konsumsi rapat (snack)	15 ORG x 1 KAL x Rp.1.425.000	15	ORG	19.000	1.425.000								SBM
		- Penggantian	1000 LBR x Rp.30.000	100	LBR	300	30.000								at cost
521211	Belanja Jasa profesi	Honorarium Narasumber Eksternal Eleton...	2 ORG x 1 JAM x 1 KAL x 2 Keg Rp.6.000.000	2	ORG	1000000	6.000.000	11500000	11500000			6.000.000			SBM
		Narasumber Akademisi	2 ORG x 1 JAM x 1 KAL x 2 Keg Rp.6.000.000	2	ORG	1000000	6.000.000								
521212	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	- Pemeriksaan Rapid Tes PCR-Swab	3 ORG x 1 Kab/Kota x 3 KL x Rp.4725000	3	ORG	300.000	2.700.000	2475000	1845000			4.725.000			Sesuai adanya penurunan Rp.300.0001 mislaku Presiden Menteriang mislaku Bulan Oktober, tahun 2021
		- Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab	3 ORG x 1Kab/Kota x 3 KL x Rp.981000	3	ORG	109.000	981.000								at cost max. di Pulau Jawa dan Bali Rp.495.000,- diluar Pulau Jawa dan Bali max. Rp.325.000,- at cost max. Rp.99.000,- (pulau Jawa dan Bali); Rp.109.000,- (luar pulau Jawa dan Bali)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- Transport dalam rangka pengumpulan data lapangan di Kab/Kota	3 ORG x 1 Kab/Kota x Rp.14.400.000	3	ORG	1.600.000	14.400.000	59550000	59365000			52.200.000			SBM
		Transport antar Kab/Kota Pulau Sumbawa	3 ORG x 4 HR x 3 Kab/Kota x Rp.15.840.000	3	ORG	38	OH	440.000	15.840.000						SBM
		- Uang harian dalam rangka pengumpulan data di Kab/Kota	3 ORG x 3 HR x 3 Kab/Kota x Rp.27.000.000	3	ORG	27	OH	560.000	15.660.000						SBM (di TOR/RAB direct per estimasi)
		Transport antar Kab/Kota Pulau Lombok	3 ORG x 1 HR x 3 Kab/Kota x Rp.6.300.000	3	ORG	18	OH	360.000	6.300.000						
		- Uang harian dalam rangka pengumpulan data di Kab Lombok Timur Kab Lombok Barat Kab Lombok Tengah dan Kab Lombok Utara													
052	Analisis kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM	Analisis kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUM/HAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah.				15.300.000		42410000	73790000			76.300.000			Komponen: Utama
A1	Analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUM/HAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah							12705000	12664000			9766000			penurunan akibat PPKM
521211	Belanja Bahan	- ATK dan Komputer supplies	1 PKT x Rp.2.281.000	1	PKT	2.281.000	2281000,00								Max. Rp.1.500.000,-
		- Kertas F4	10 Rm x 1	10	Rm	55.000	550.000								
		- Kertas A4	6 Rm x 1	6	Rm	56.000	336.000								
		- Mapbusiness Be jinis blue	15 Pak x 1	15	Pak	3.000	45.000								
		- Ballpoint	14 Lusin x 1	14	Lusin	25.000	350.000								
		- Tinta Roll	2 buah x 1	2	buah	100.000	200.000								
		- Amplip	4 Pak x 1	4	Pak	22.000	88.000								
		- Konsumsi rapat (makan)	15 ORG x 1 KAL x Rp.5.160.000	15	ORG	43.000	5.160.000								SBM
		- Konsumsi rapat (snack)	15 ORG x 1 KAL x Rp.2.280.000	15	ORG	19.000	2.280.000								SBM
		- Penggantian	150 LBR x Rp.45.000	150	LBR	300	45.000								at cost
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	- Biaya pembelian paket data internet/pulsa	... ORG x ... PKT x ... BLN x Rp ...												SBM (Untuk Masyarakat yang ikut kegiatan daring dapat diberikan Rp.150.000/ org/bli)
521211	Belanja Jasa profesi	Honorarium Narasumber Akademisi	1 ORG x 1 JAM x 1 KAL x 4 Keg Rp.8.000.000	2	ORG	1000000	8.000.000	8	OJ	1000000		8.000.000			SBM
521212	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	- Pemeriksaan Rapid Tes PCR-Swab	3 ORG x 1 PROV x 2 KL x Rp.654.000	3	ORG	300.000	1.800.000	6	OK	300.000		1.800.000			at cost max. di Pulau Jawa dan Bali Rp.495.000,- diluar Pulau Jawa dan Bali max. Rp.325.000,- at cost max. Rp.99.000,- (pulau Jawa dan Bali); Rp.109.000,- (luar pulau Jawa dan Bali)
		- Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab	3 ORG x 1 PROV x 2 KL x Rp.654.000	3	ORG	109.000	654.000	6	OK	109.000		654.000			
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- >>> Verifikasi pengumpulan data lapangan di Kab/Kota	3 ORG x 3 Kab/Kota x 1 Keg Rp.9.600.000			6	OK	54630000	54535000			54.730.000			SBM (di TOR/RAB direct per estimasi)
		- Transport dalam rangka pengumpulan data lapangan di Kab/Kota													
		Transport antar Kab/Kota Pulau Sumbawa	3 ORG x 3 HR x 3 Kab/Kota x 1 Keg Rp.10.560.000	3	ORG	24	OH	440.000	10.560.000						SBM (di TOR/RAB direct per estimasi)
		- Uang harian dalam rangka pengumpulan data di Kab/Kota	3 ORG x 3 HR x 3 Kab/Kota x 1 Keg Rp.10.440.000	3	ORG	18	OH	580.000	10.440.000						SBM (di TOR/RAB direct per estimasi)
		- Biaya penggantian dalam rangka pengumpulan data di Kab/Kota													
		- >>> Verifikasi pengumpulan data lapangan di Kab/Kota	3 ORG x 4 HR x 3 Kab/Kota x 1 Keg Rp.10.560.000	3	ORG	9	OH	350.000	3.150.000						
		- Uang harian dalam rangka pengumpulan data di Kab Lombok Timur Kab Lombok Barat Kab Lombok Tengah dan Kab Lombok Utara													
		- >>> Koordinasi dan konsultasi ke Jakarta	3 ORG x 1 Keg x Rp.6.400.000	3	ORG	2	OK	3.200.000	6.400.000						SBM
		- Taksi Transport dalam rangka koordinasi ke Jakarta	3 ORG x 1 Prov x 4 HR x 1 Keg x Rp.5.280.000	3	ORG	12	OH	440.000	5.280.000						SBM
		- Uang harian dalam rangka koordinasi ke Jakarta	3 ORG x 3 HR x 1 Keg x Rp.5.570.000	3	ORG	9	OH	730.000	6.570.000						SBM (di TOR/RAB direct per estimasi)
		- Biaya taksi Provinsi DKI Jakarta	3 ORG x 2 KL x 1 Keg x Rp.1.200.000	3	ORG	6	OK	200.000	1.200.000						SBM
		- Biaya taksi Provinsi Asal	3 ORG x 2 KL x 1 Keg x Rp.1.530.000	3	ORG	6	OK	255.000	1.530.000						SBM
053	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kuesioner Pelayanan Publik Berbasis IPK-RM					59.990.000		38790000	38144425			59990000			Komponen: Utama
A1	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-KM)							8830000	8194500			6669000			
521211	Belanja Bahan	- ATK dan Komputer supplies	1 PKT x Rp.1.043.000	1	PKT	1.043.000	1.043.000								Max. Rp.1.500.000,-
		- Konsumsi rapat (makan)	15 ORG x 1 KAL x 5 Keg Rp.3.225.000	15	ORG	43.000	3.225.000								SBM
		- Konsumsi rapat (snack)	15 ORG x 1 KAL x 5 Keg Rp.1.425.000	15	ORG	19.000	1.425.000								SBM
		- Penggantian	2700 LBR x Rp.116.000	2700	LBR	300	816.000								at cost
		- Penjualan	12 EXP x Rp.360.000	12	EXP	30.000	360.000								at cost
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	- Biaya pembelian paket data internet/pulsa	... ORG x ... PKT x ... BLN x Rp ...												SBM (Untuk Masyarakat yang ikut kegiatan daring dapat diberikan Rp.150.000/ org/bli)
521211	Belanja Jasa profesi	Honorarium Narasumber Eksternal Eleton...	1 ORG x 2 JAM x 1 KAL x 3 Keg Rp.3.000.000	1	ORG	1.000.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000			3.000.000			SBM
521212	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	- Pemeriksaan Rapid Tes PCR-Swab	... ORG x ... PROV x ... KL x Rp ...												at cost max. di Pulau Jawa dan Bali Rp.495.000,- diluar Pulau Jawa dan Bali max. Rp.325.000,- at cost max. Rp.99.000,- (pulau Jawa dan Bali); Rp.109.000,- (luar pulau Jawa dan Bali)
		- Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab	... ORG x ... PROV x ... KL x Rp ...												
524111	Belanja Perjalanan Biasa	- >>> Verifikasi Pengumpulan data lapangan di Pulau Sumbawa	3 ORG x 3 Kab/Kota x 1 Keg Rp.14.400.000	3	ORG	9	OK	1.600.000	14.400.000						SBM (di TOR/RAB direct per estimasi)
		- Transport dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapangan data hasil survei online	3 ORG x 4 HR x 3 Kab/Kota x 1 Keg Rp.15.840.000	3	ORG	38	OH	440.000	15.840.000						SBM (di TOR/RAB direct per estimasi)
		- Uang harian dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapangan data hasil survei online	3 ORG x 3 HR x 3 Kab/Kota x 1 Keg Rp.15.840.000	3	ORG	19	OH	580.000	10.440.000						SBM (di TOR/RAB direct per estimasi)
		- Biaya penggantian dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapangan data hasil survei online													
		- >>> Verifikasi Pengumpulan data lapangan di Pulau Lombok	3 ORG x 1 HR x 3 Kab/Kota x 3 Keg Rp.9.450.000	3	ORG	27	OH	350.000	9.450.000						
		- Uang harian dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapangan data hasil survei online di Kab Lombok Timur Kab Lombok Barat dan Kab Lombok Tengah													
5248.ABD.002	Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah					14.171.000	1.Rekomendasi Kebijakan								Komponen: Utama
051	Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Hasil-hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM perlu disebarluaskan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) di Provinsi agar dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan tugas dan fungsi di Wilayah.													

